

NAMA : Puji Lestarina Sinaga
NPM : 2217011116
KELAS : KIMIA-D

ANALISIS JURNAL

Analisis lebih spesifik dari artikel jurnal "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)", Artikel ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan etika dalam politik hukum Indonesia. Pancasila bukan hanya landasan normatif, tetapi juga sumber nilai moral yang harus tercermin dalam hukum nasional.

Poin-poin yang dibahas dalam artikel ini yaitu:

1. Signifikansi Pancasila dalam Politik Hukum

- Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber etika dimana menekankan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi etis yang membentuk nilai dalam hukum Indonesia.
- Keterkaitan antara hukum dan etika yang menyatakan bahwa hukum tanpa dasar etika akan kehilangan arah, sementara etika tanpa hukum tidak memiliki sanksi yang mengikat dan efektif.
- Tujuan politik hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa politik hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan hukum yang mencerminkan nilai Pancasila, sehingga hukum menjadi lebih adil dan humanis.

2. Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Perspektif Pancasila

- Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku dengan sanksi, sedangkan etika berkaitan dengan nilai dan moralitas yang membentuk perilaku.
- Dalam politik hukum Indonesia, harmoni antara hukum dan etika penting untuk menciptakan keadilan yang nyata, bukan hanya keadilan prosedural.
- Peran Pancasila sebagai sumber etika hukum, dimana Pancasila memberikan kerangka nilai etika yang ideal, yang seharusnya menjadi landasan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam setiap aspek hukum.

3. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Etik dalam Politik Hukum Indonesia

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya spiritualitas dalam hukum, di mana setiap produk hukum harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang universal.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hukum di Indonesia harus berlandaskan kemanusiaan, menghormati martabat manusia, dan menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun.

- Sila Persatuan Indonesia bahwa hukum harus memperkuat persatuan nasional, menghindari pemecahbelahan, dan berfungsi sebagai alat pemersatu.
- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Dalam pembuatan hukum, prinsip musyawarah harus diutamakan, di mana suara rakyat menjadi bagian dari proses legislasi.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hukum harus mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan, memastikan semua warga negara menikmati manfaat yang sama tanpa diskriminasi.

4. Prinsip-Prinsip dalam Politik Hukum yang Berlandaskan Pancasila

- Prinsip Keadilan Sosial, hukum harus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat dan menghindari ketimpangan sosial. bahwa keadilan sosial harus tercermin dalam kebijakan hukum, seperti akses yang merata ke layanan dasar dan hak-hak ekonomi.
- Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setiap kebijakan hukum harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan setiap orang dengan adil. Ini berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif dalam sistem hukum.
- Prinsip Kedaulatan Rakyat, rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam pembentukan hukum, sehingga hukum yang dibuat harus mencerminkan kehendak rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.

5. Analisis Implementasi Pancasila dalam Politik Hukum di Indonesia

- Evaluasi penerapan Pancasila, bahwa meskipun Pancasila sudah dijadikan pedoman, masih banyak produk hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sepenuhnya, misalnya dalam kasus ketidakadilan sosial atau ketidakmerataan akses terhadap keadilan.
- Tantangan dalam implementasi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi yang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.
- Pentingnya komitmen terhadap nilai Pancasila, menurut artikel ini, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan politik hukum yang benar-benar berlandaskan nilai Pancasila.

6. Pancasila sebagai Pedoman Etik Politik Hukum

- Integrasi Pancasila sebagai panduan moral, Pancasila tidak hanya dasar negara tetapi juga panduan moral yang perlu terintegrasi dalam politik hukum untuk menciptakan sistem hukum yang adil.
- Harapan terhadap hukum Indonesia, hukum di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta hukum yang adil, beradab, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
- Kepentingan penerapan nilai Pancasila dalam tiap tahapan politik hukum, artikel menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipegang teguh dalam setiap tahap politik

hukum, mulai dari perumusan hingga implementasi, untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial.